

Framing Analysis of News Coverage on the State Civil Apparatus (ASN) Transfer Conflict Between the Regent and Deputy Regent of Sidoarjo

[Analisis Framing Pemberitaan Konflik Mutasi ASN Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo]

Achmad Arfan Hanafi¹⁾, Istiqomah²⁾, Poppy Febriana³⁾, M. Andi Fikri⁴⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi : istiqomah@umsida.ac.id

Abstract. *The internal conflict between Regent Subandi and Deputy Regent Mimik Idayana regarding the State Civil Apparatus (ASN) transfer policy in Sidoarjo Regency in September 2025 has generated diverse media constructions of reality. This qualitative comparative study analyzes the framing of Detik.com, Kompas.com, and Suara Surabaya using Robert N. Entman's model on 13 news articles published between September 17 and 26, 2025. The results reveal sharp differences in epistemic orientation. Detik.com frames the conflict as a personal elite feud through episodic journalism. Kompas.com applies contextual journalism to depersonalize the issue into a structural failure of regional governance. Meanwhile, Suara Surabaya practices institutional genre duality; maintaining balance in its straight news while firmly highlighting threats to public service in its editorial column. In conclusion, these framing differences are driven by editorial orientation, contextual proximity, and source selection strategies, which potentially polarize public perception regarding the leadership crisis.*

Keywords - ASN Transfer; Framing Analysis; Online Media; Regional Head Conflict; Sidoarjo

Abstrak. *Konflik internal antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana terkait kebijakan mutasi ASN di Kabupaten Sidoarjo pada September 2025 telah memunculkan konstruksi realitas media yang beragam. Penelitian komparatif kualitatif ini menganalisis framing Detik.com, Kompas.com, dan Suara Surabaya menggunakan model Robert N. Entman terhadap 13 berita pada periode 17–26 September 2025. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan orientasi epistemik yang tajam. Detik.com membingkai konflik sebagai perseteruan personal antar-elite melalui jurnalisme episodik. Kompas.com menerapkan jurnalisme kontekstual untuk mendepersonalisasi isu menjadi kegagalan struktural tata kelola daerah. Sementara itu, Suara Surabaya mempraktikkan dualitas genre kelembagaan; menjaga keseimbangan di berita harian (straight news) namun tegas menyoroti ancaman pelayanan publik di ruang tajuk opini (editorial). Kesimpulannya, perbedaan framing ini dipengaruhi oleh orientasi editorial, kedekatan kontekstual media, dan strategi pemilihan narasumber, yang berpotensi mempolarisasi persepsi masyarakat terhadap krisis kepemimpinan tersebut.*

Kata Kunci - Analisis Framing; Konflik Kepala Daerah; Media Online; Mutasi ASN; Sidoarjo

I. PENDAHULUAN

Peta kepemimpinan Sidoarjo resmi berganti pasca ajang Pilkada 2024. Duet Subandi dan Mimik Idayana sukses memenangkan kontestasi dengan raihan dukungan sebesar 58 persen, mengungguli pasangan Achmad Amir Aslichin dan Edy Widodo yang hanya memperoleh 42 persen suara [1]. Kemenangan mutlak ini membawa corak politik yang kuat, mengingat Subandi dikenal sebagai Ketua DPC PKB Sidoarjo, sementara Mimik Idayana sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Sidoarjo dari Partai Gerindra [2]. Keduanya mengusung koalisi lintas partai yang solid dan menegaskan komitmen mereka untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mengajak seluruh elemen masyarakat berkolaborasi membangun Sidoarjo yang lebih baik [3]. Kemenangan pasangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai penguasa Pilkada Sidoarjo selama nyaris 20 tahun [4]. Ekspektasi publik pun terbentuk bahwa pemerintahan periode 2025-2030 ini akan berjalan sinergis dan harmonis.

Namun, harapan tersebut mulai terguncang akibat keretakan internal yang tereskalasi sejak Maret 2025 [5]. Puncak gesekan terjadi pada 17 September 2025 ketika Bupati Subandi melangsungkan pelantikan mutasi ASN tanpa kehadiran Wakil Bupati Mimik Idayana [6]. Mimik menilai kebijakan tersebut menyimpang dari kesepakatan awal pengisian 31 jabatan yang membengkak tanpa koordinasi [7], berujung pada pelaporan resmi ke Kementerian Dalam Negeri [8]. Di sisi lain, Subandi mengklaim mutasi telah sesuai regulasi dan disetujui BKN [9]. Pakar politik Unesa, Ken Bimo Sultoni, menilai situasi ini mencerminkan rapuhnya fondasi politik lokal akibat retaknya relasi kekuasaan

[10]. Konflik mutasi ASN ini dipilih sebagai fokus penelitian karena memenuhi tiga kriteria sekaligus, menjadi konflik terbuka pertama yang terdokumentasi resmi [7], berdampak langsung pada kebijakan publik [6]. serta memicu respons pemberitaan media secara masif [11].

Ketegangan di tubuh Pemkab Sidoarjo ini ternyata merembet luas dan tidak lagi sekadar menjadi urusan dapur internal pemerintah. Peristiwa tersebut kemudian menjadi konsumsi publik yang masif ketika media online mengangkat dan memberitakannya secara luas dengan beragam sudut pandang. Di sinilah peran media tidak dapat diabaikan, sebab media bukan sekadar saluran informasi, melainkan aktor aktif yang turut membentuk cara publik memaknai sebuah peristiwa. Atas dasar itulah, penelitian ini memilih tiga media online sebagai objek analisis, yaitu Detik.com, Kompas.com, dan Suara Surabaya, dengan pertimbangan untuk studi komparatif kualitatif. Penelitian ini secara spesifik membandingkan ketiga media tersebut untuk mengungkap perbedaan bagaimana framing yang dibangun oleh masing-masing media atas peristiwa yang sama.

Pemilihan ketiga media tersebut didasarkan pada data dan pertimbangan yang konkret. Berdasarkan data Similarweb Oktober 2025, Detik.com menempati posisi pertama sebagai media online dengan trafik tertinggi di kategori *News and Media Publishers* di Indonesia, diikuti Kompas.com di posisi kedua [12]. Tingginya trafik kedua media ini menjadikan framing yang mereka produksi berpotensi memengaruhi persepsi publik dalam skala yang sangat luas. Namun keduanya memiliki orientasi *editorial* yang berbeda. Detik.com dikenal dengan karakter pemberitaan yang cepat dan berbasis nilai berita tinggi, sementara Kompas.com justru memimpin di wilayah pedesaan dan daerah-daerah kecil, menunjukkan jangkauan yang lebih merata dan orientasi audiens yang berbeda dibanding Detik.com yang mendominasi kawasan urban besar [13]. Perbedaan karakter dan orientasi audiens inilah yang menjadikan keduanya menarik untuk dikaji secara berdampingan. Adapun Suara Surabaya dipilih sebagai representasi media lokal Jawa Timur yang memiliki legitimasi dan rekam jejak panjang. portal suarasurabaya.net sendiri sudah mengudara sejak 1999 di bawah naungan Suara Surabaya Media yang eksis sejak pertengahan 1983 [14]. Media ini bahkan mengklaim sebagai yang pertama di Indonesia menerapkan format radio news interaktif solutif, sebuah tradisi jurnalisme komunitas yang mengakar kuat di Surabaya dan Sidoarjo. Kedekatan geografis dan kontekstual yang dimiliki Suara Surabaya dengan isu pemerintahan daerah Sidoarjo inilah yang tidak dimiliki oleh media nasional manapun, dan itulah yang menjadikannya relevan sebagai representasi suara lokal dalam penelitian ini.

Perbedaan orientasi *editorial* dan kedekatan kontekstual dari ketiga media tersebut memunculkan asumsi kuat bahwa cara masing-masing media membingkai peristiwa konflik ini akan berbeda-beda. Untuk mengungkap dan menganalisis perbedaan konstruksi realitas itulah, penelitian ini menggunakan konsep framing sebagai kerangka analisis. Dalam perspektif komunikasi politik, realitas yang tersaji di media bukanlah cerminan objektif dari kejadian sesungguhnya, melainkan hasil dari proses seleksi, penekanan, dan pemaknaan yang dilakukan oleh redaksi. Menurut Entman (1993), framing adalah cara media memilih dan menonjolkan bagian tertentu dari sebuah peristiwa. Tujuannya adalah agar audiens bisa mengenali akar masalah, mengetahui penyebabnya, memberikan penilaian moral, dan melihat solusi yang disarankan oleh media tersebut [15].

Di antara berbagai model analisis framing yang tersedia, penelitian ini secara spesifik memilih model Entman dengan pertimbangan metodologis yang kuat. Model Pan dan Kosicki (1993) sesungguhnya menawarkan kedalaman analisis yang lebih rinci karena membedah framing dari empat struktur sekaligus, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Namun model tersebut lebih tepat digunakan untuk analisis mendalam terhadap satu atau dua teks karena tingkat kerinciannya justru menyulitkan identifikasi pola framing ketika diterapkan pada beberapa berita dari tiga media yang berbeda secara bersamaan [16]. Model Gamson dan Modigliani yang menggunakan konsep kemasan lebih cocok untuk kajian wacana jangka panjang dalam konteks gerakan sosial dan perubahan opini publik, sementara penelitian ini berfokus pada periode pemberitaan yang spesifik yaitu 17 hingga 26 September 2025. Model Murray Edelman yang berbasis kategorisasi bahasa lebih relevan untuk fenomena disinformasi dan hoaks daripada untuk menganalisis konstruksi narasi dalam pemberitaan konflik kebijakan. Model Entman dipilih karena empat elemennya, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgment*, dan *treatment recommendation*, bersifat konseptual dan langsung dapat diterapkan pada level makna teks tanpa memerlukan pembedahan struktur linguistik yang rumit [15]. Lebih penting lagi, model Entman secara eksplisit menekankan proses seleksi dan penonjolan, yaitu aspek mana yang ditonjolkan dan aspek mana yang justru diabaikan oleh media, yang merupakan inti dari pertanyaan penelitian ini.

Pemahaman tentang bagaimana media membingkai sebuah peristiwa menjadi penting karena framing yang berbeda akan menghasilkan persepsi publik yang berbeda pula. Penelitian Rahmanto dkk (2022) menunjukkan bahwa framing yang digunakan media dalam memberitakan kepemimpinan kepala daerah berpengaruh langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya [17]. Dalam konteks konflik mutasi ASN di Sidoarjo, implikasi ini menjadi sangat nyata. Jika media membingkai konflik ini semata sebagai drama personal antara dua pejabat, publik cenderung melihatnya sebagai persoalan ego individu yang tidak perlu ditanggapi serius. Sebaliknya, jika media membingkainya sebagai kegagalan tata kelola pemerintahan daerah, publik akan menilai persoalan ini sebagai masalah sistemik yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan. Perbedaan bingkai ini tidak hanya berdampak pada persepsi publik, tetapi juga berimplikasi pada legitimasi kebijakan, kepercayaan

terhadap institusi pemerintahan daerah, dan pada akhirnya pada partisipasi politik masyarakat Sidoarjo dalam mengawal jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, menganalisis bagaimana media online membingkai peristiwa ini menjadi urgen, bukan sekadar sebagai kajian akademis, melainkan sebagai upaya memahami bagaimana media menempatkan, menafsirkan, dan mengarahkan pemaknaan publik atas sebuah konflik kekuasaan di tingkat pemerintahan daerah.

Topik framing di media online sudah sering dibahas dalam ilmu komunikasi. Misalnya, Muslyha dkk. (2025) meneliti isu dinasti politik saat pemilu di situs Kompas.com dan Tempo.co. Di tingkat daerah, Sucipta dan Kurniawan (2021) meneliti berita tentang kebijakan Gubernur Kalimantan Timur, namun belum membahas soal konflik antar-pejabat. Selanjutnya, Rahmanto dkk. (2022) mengkaji gaya komunikasi pimpinan daerah saat pandemi COVID-19 memakai teori Entman. Ada pula Nabila dan Aji'Anamta (2024) yang meneliti berita konflik lahan antara masyarakat dan pemerintah di Rempang. Dari keempat penelitian tersebut, teridentifikasi celah (*research gap*) bahwa belum ada studi yang secara spesifik mengkaji framing media online atas konflik internal antara kepala daerah dan wakilnya yang dipicu oleh kebijakan birokrasi di tingkat lokal. Dari keempat penelitian tersebut teridentifikasi celah yang belum terjawab. Penelitian-penelitian terdahulu masing-masing mengkaji framing atas dinamika kekuasaan kepala daerah dalam konteks pemilu, framing atas kebijakan tunggal seorang pemimpin daerah, framing komunikasi kepemimpinan dalam situasi krisis, serta framing konflik antara pemerintah dan masyarakat atas kebijakan publik berskala nasional. Namun belum ada yang secara spesifik mengkaji framing media online atas konflik internal antara kepala daerah dan wakilnya yang dipicu oleh kebijakan birokrasi, dalam konteks pemerintahan lokal yang konkret. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan fokus pada konflik Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo atas kebijakan mutasi ASN pada September 2025, yang dianalisis melalui pemberitaan Detik.com, Kompas.com, dan Suara Surabaya menggunakan model framing Entman.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana framing media online Detik.com, Kompas.com, dan Suara Surabaya dalam memberitakan konflik mutasi ASN antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo berdasarkan analisis framing Robert N. Entman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan membandingkan secara komparatif framing yang digunakan oleh ketiga media online tersebut dalam memberitakan peristiwa yang sama. Adapun manfaat penelitian ini mencakup dua dimensi. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian analisis framing, khususnya model Entman, dalam ranah jurnalisme politik lokal dan studi komunikasi pemerintahan daerah di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi media online dalam menjaga objektivitas pemberitaan isu politik lokal, sekaligus menjadi referensi bagi publik dan pemangku kebijakan dalam memahami konstruksi narasi yang dibangun media atas konflik kekuasaan di tingkat kabupaten. Penelitian ini dibatasi pada pemberitaan mengenai kebijakan mutasi ASN yang memicu konflik antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana, dengan media yang dianalisis meliputi Detik.com, Kompas.com, dan Suara Surabaya, pada periode September 2025, menggunakan kerangka analisis framing Robert N. Entman.

II. METODE

Studi ini dirancang memakai desain deskriptif kualitatif. Tujuannya murni untuk memotret dan menafsirkan sebuah kejadian secara rinci, tanpa ada niat mengubah atau memanipulasi fakta natural di lapangan. Mengacu pada Sugiyono (2017), riset berparadigma kualitatif merupakan investigasi yang menitikberatkan pada penjelajahan fenomena dalam setting naturalnya. Melalui pendekatan ini, peneliti berkedudukan sebagai instrumen primer dalam menjangkau data, di mana alur analisisnya bergerak secara induktif guna menggali kedalaman makna esensial, alih-alih mengejar penarikan kesimpulan statistik yang masif [18]. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bermaksud mengukur atau menguji hipotesis, melainkan berupaya memahami bagaimana media online mengonstruksi realitas atas peristiwa konflik mutasi ASN antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo melalui bingkai pemberitaan yang mereka produksi. Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme, yang memandang bahwa realitas sosial tidak bersifat tunggal dan objektif, melainkan dikonstruksi secara aktif oleh aktor-aktor sosial, termasuk media, melalui bahasa dan narasi yang mereka gunakan. Moleong (2017) memaparkan bahwa fondasi filosofis riset ini bertumpu pada ikhtiar penyelidikan yang komprehensif. Tujuannya adalah mendekonstruksi suatu kejadian secara utuh murni dari kacamata atau perspektif para aktor yang terlibat [19].

Objek penelitian ini adalah teks berita yang diterbitkan oleh tiga media online, yaitu Detik.com, Kompas.com, dan Suara Surabaya, dalam rentang waktu September 2025, khususnya pemberitaan yang berkaitan langsung dengan kebijakan mutasi ASN di Kabupaten Sidoarjo dan konflik yang ditimbulkannya antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana.

Untuk menjangkau data, riset ini mengandalkan penelusuran dokumentasi. Langkah konkretnya meliputi pencarian, pemilahan, dan pemilihan teks berita dari ketiga media online tersebut yang memuat pemberitaan tentang konflik mutasi ASN di Sidoarjo pada periode September 2025. Sebagaimana diungkapkan Kriyantono (2021), prosedur dokumentasi dalam studi keilmuan komunikasi mewajibkan peneliti untuk menghimpun ragam material sekunder.

Material tersebut mencakup naskah tertulis, arsip pemberitaan digital, maupun berkas multimedia yang memiliki korelasi langsung dengan fokus problematika riset [20]. Penyaringan berita dieksekusi dengan menetikkan kueri pencarian khusus seperti "mutasi ASN Sidoarjo", "Subandi Mimik Idayana", dan "konflik bupati wakil bupati Sidoarjo" pada masing-masing platform media. Berdasarkan proses seleksi tersebut, diperoleh total 13 berita sebagai korpus analisis yang terdiri dari 6 berita dari Detik.com, 3 berita dari Kompas.com, dan 4 berita dari Suara Surabaya. Rentang waktu pengambilan data difokuskan pada periode eskalasi konflik, yakni 17 hingga 26 September 2025. Terkait distribusi waktu publikasi, Detik.com dan Suara Surabaya secara intensif memproduksi berita tepat pada fase awal pecahnya konflik yaitu 17-24 September 2025. Sebaliknya, berdasarkan penelusuran data secara komprehensif, Kompas.com tidak menerbitkan berita pada fase awal tersebut dan baru mempublikasikan liputannya pada 25-26 September 2025. Perbedaan rentang waktu publikasi serta jumlah berita antar-media ini bukan merupakan ketimpangan metodologis, melainkan sebuah temuan empiris awal. Absennya Kompas.com pada minggu pertama menunjukkan kebijakan *editorial* yang memilih untuk tidak terseret arus *breaking news* yang konfrontatif, melainkan menunggu dinamika isu tersebut matang untuk kemudian dianalisis secara struktural.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis framing model Robert N. Entman dengan empat elemen analisis. Merujuk penjelasan Eriyanto (2012), skema analisis bingkai rancangan Entman bekerja sebagai instrumen sistematis untuk melacak taktik institusi pers dalam menyortir sekaligus menggarisbawahi fragmen spesifik dari suatu peristiwa. Manuver ini pada akhirnya berfungsi sebagai katalis untuk menggiring audiens menuju penafsiran realitas yang sejalan dengan agenda media [16]. Pertama, *define problems* (pendefinisian masalah), yaitu mengidentifikasi bagaimana media mendefinisikan peristiwa mutasi ASN tersebut, apakah sebagai persoalan prosedural birokrasi, konflik kekuasaan, atau pelanggaran hukum kepegawaian. Kedua, *diagnose causes* (identifikasi penyebab), yaitu mengidentifikasi siapa atau apa yang dianggap media sebagai aktor penyebab munculnya konflik, apakah Bupati, Wakil Bupati, sistem birokrasi, atau faktor lainnya. Ketiga, *make moral judgment* (penilaian moral), yaitu mengidentifikasi nilai atau penilaian etis yang secara eksplisit maupun implisit dihadirkan media dalam membingkai pihak-pihak yang terlibat. Keempat, *treatment recommendation* (rekomenasi solusi), yaitu mengidentifikasi solusi atau tindakan apa yang disarankan atau diimplikasikan media sebagai jalan keluar atas konflik yang terjadi [15]. Keempat elemen ini diterapkan secara sistematis terhadap setiap berita dalam korpus analisis, kemudian hasilnya dibandingkan antarketiga media untuk menemukan pola framing yang dominan serta perbedaan konstruksi realitas yang dihasilkan masing-masing media. Untuk menjamin keabsahan data kualitatif dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber [19]. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara membaca, mencermati, dan menganalisis secara berulang-ulang 13 teks berita terkait mutasi ASN Sidoarjo untuk memastikan ketepatan kategorisasi berdasarkan empat elemen framing Entman. Sementara itu, triangulasi sumber diaplikasikan dengan cara mengomparasikan kecenderungan pemberitaan dari tiga media yang berbeda latar belakang dan jangkauannya, yakni Detik.com, Kompas.com, dan Suara Surabaya, guna menghindari bias interpretasi tunggal peneliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana yang dipicu kebijakan mutasi 61 ASN pada September 2025 tidak hanya menjadi persoalan tata kelola pemerintahan daerah, tetapi juga menjadi peristiwa yang dikonstruksi secara berbeda oleh media online sesuai dengan orientasi *editorial* masing-masing. Bagian ini menyajikan hasil analisis framing terhadap 13 berita dari tiga media online yaitu Detik.com dengan 6 berita, Kompas.com dengan 3 berita, dan Suara Surabaya dengan 4 berita yang diterbitkan dalam rentang 17 hingga 26 September 2025, menggunakan empat elemen analisis framing Robert N. Entman (1993) : *define problems, diagnose causes, make moral judgment, dan treatment recommendation*. Temuan ini disajikan secara berurutan per media, masing-masing dilengkapi tabel ringkasan yang memuat analisis tiap berita dalam corpus, dan ditutup dengan perbandingan lintas media untuk mengungkap bagaimana ketiga media mengonstruksi realitas yang berbeda atas peristiwa yang sama.

A. Framing pemberitaan Detik.com

Detik.com menerbitkan enam berita dalam rentang 17 hingga 24 September 2025, menjadikannya media dengan corpus terbanyak dalam penelitian ini. Untuk melihat bagaimana media ini mengonstruksi realitas peristiwa mutasi ASN Sidoarjo, analisis dilakukan dengan membedah teks berdasarkan empat elemen framing Robert N. Entman, yang rinciannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Temuan Analisis Framing Detik.com (Corpus : B1–B6)

Elemen Entmen	Temuan Per-Berita dalam Corpus	Pola Dominan Media
---------------	--------------------------------	--------------------

Define Problems	B1 [6], Mutasi ASN didefinisikan sebagai pemicu memanasnya konflik personal yang sudah berlangsung sebelumnya. Konflik staf pribadi Bupati turut disajikan sebagai latar persoalan yang belum tuntas. B2 [21], Masalah didefinisikan sebagai tindakan sepihak Bupati yang mengabaikan hak Wabup sebagai pengarah TPK. Mimik mengaku baru mengetahui siapa saja yang dimutasi justru dari pemberitaan media. B3 [22], Definisi masalah berbalik arah. Mutasi tidak lagi disebut sebagai pelanggaran, melainkan kesalahpahaman prosedur, karena kehadiran BKN yang memvalidasi. B4 [23], Masalah diperluas. Bukan hanya soal jumlah ASN yang melebihi kesepakatan awal, dari 31 menjadi 61, tetapi juga objektivitas penilaian kinerja. Format listicle enam fakta mengemas konflik ini sebagai serial drama. B5 [24], Konflik didefinisikan sudah memasuki arena formal, berlanjut pada pelaporan ke Kemendagri. B6 [25], Masalah bergeser ke sengketa administratif formal karena Wabup resmi melaporkan Bupati.	Konflik personal antara dua individu, yaitu Bupati melawan Wabup, yang bergerak melalui tahap eskalasi dramatis hingga sengketa formal. Detik.com cenderung menjadikan konflik ini sebagai konten berseri yang ditulis bertahap dari hari ke hari, sehingga mutasi ASN selalu diposisikan sebagai pemicu, bukan sebagai inti persoalan tata kelola.
Diagnose Causes	B1 [6], Dua penyebab muncul secara paralel. Bupati memaksakan mutasi tanpa menginformasikan Mimik, dan staf pribadi Bupati mengambil alih kewenangan pengelolaan teknologi informasi di BKD. B2 [21], Bupati Subandi ditempatkan sebagai penyebab tunggal. Mutasi dilaksanakan tanpa komunikasi ke Wabup. B3 [22], Penyebab bergeser menjadi ketidakpahaman prosedur secara umum melalui BKN. Ini menjadi satu-satunya anomali dalam corpus Detik.com. B4 [23], Bupati dianggap melanggar kesepakatan awal soal jumlah ASN. BKN hanya memverifikasi data teknis, sehingga ada celah prosedural yang tidak tercover. B5 [24], Penyebabnya ditegaskan kembali, yaitu penambahan jumlah ASN yang tidak pernah dikomunikasikan kepada Mimik. B6 [25], Penyebab tampil paling eksplisit, yaitu Bupati dianggap melampaui kewenangan yang seharusnya dikonsultasikan.	Tindakan sepihak Bupati Subandi menjadi penyebab utama di lima dari enam berita. Namun redaksi Detik.com cenderung menerima begitu saja klaim para pejabat tanpa mengonfirmasinya ke data resmi. Ini terlihat dari dua angka yang tidak pernah dicocokkan sendiri oleh Detik.com, yaitu 31 jabatan di B4 dan 36 OPD di B6, serta perbedaan jumlah ASN yang dimutasi antara 60 di beberapa judul berita dan 61 di isi berita.
Make Moral Judgment	B1 [6], Mimik mendominasi dengan empat kutipan emosional. Subandi hanya hadir defensif lewat satu kutipan sambutan pelantikan. B2 [21], Mimik menjadi satu-satunya narasumber aktif dengan tiga kutipan. B3 [22], Ini menjadi anomali. Mimik tidak dikutip sama sekali, BKN dan Subandi justru mendominasi. Penilaian moral berbalik ke arah legitimasi Bupati. B4 [23], Mimik mengutip regulasi konkret, yaitu PP Nomor 20 Tahun 2019 dan UU Nomor 20 Tahun 2023, sehingga tampil lebih kredibel.	Penilaian moral secara implisit memihak Mimik melalui dominasi lebih dari dua puluh kutipan secara kumulatif. Namun penilaian ini tidak konsisten, dan sangat bergantung pada siapa yang lebih banyak diberi ruang bicara di setiap berita, dengan B3 sebagai satu-satunya pengecualian. Karena tidak ada pakar independen dalam seluruh corpus Detik.com, penilaian moral terbentuk

	B5 [24], Mimik tampil sebagai pihak yang bereaksi atas pelanggaran, sementara Subandi tampil defensif. B6 [25], Subandi tidak dikutip sama sekali. Penilaian moral di berita ini paling kuat memihak Mimik.	murni dari ketimpangan akses narasumber, bukan dari analisis yang berimbang.
Treatment Recommendation	B1 [6], Tidak ada rekomendasi tersurat. Rekomendasi tersirat adalah investigasi yang diminta Mimik seharusnya direspons Bupati. B2 [21], Tidak ada rekomendasi tersurat. Rekomendasi tersirat adalah TPK seharusnya melaporkan progres kepada seluruh pengarah. B3 [22], Rekomendasi tersirat, yaitu mempercayakan proses pada kewenangan Bupati selaku PPK dan BKN sebagai otoritas kepegawaian. B4 [23], Rekomendasi eksplisit muncul untuk pertama kalinya, berupa laporan ke Kemendagri sebagai jalur penyelesaian yang sah. B5 [24], Rekomendasi tersirat, yaitu laporan ke Kemendagri dianggap sebagai langkah yang wajar. B6 [25], Rekomendasi tampil paling eksplisit, yaitu Kemendagri diminta turun langsung ke Sidoarjo.	Rekomendasi bersifat reaktif dan formal, mengarahkan konflik ke tingkat intervensi Kemendagri di B4 dan B6. Detik.com tidak pernah menawarkan rekomendasi perbaikan mekanisme internal, dialog antarpihak, atau reformasi regulasi jangka panjang.

Berdasarkan sintesis keempat elemen framing Entman, Detik.com secara konsisten membingkai mutasi ASN sebagai pemantik persetujuan personal antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana. Melalui jurnalisme episodik yang sarat nuansa dramatik, media ini mempraktikkan komodifikasi konflik dengan mengeksploitasi klaim elite tanpa verifikasi data mandiri (jurnalisme de jure). Arah penilaian moral yang bias terbentuk dari ketimpangan akses narasumber yang memihak kubu Wakil Bupati, sementara rekomendasi solusinya cenderung reaktif dengan sekadar mengarahkan eskalasi penyelesaian ke tingkat Kemendagri. Pola yang mereduksi substansi tata kelola birokrasi menjadi serial drama elite ini selaras dengan temuan Sucipta dan Kurniawan (2021) bahwa Detik.com cenderung menonjolkan aktor individual dalam membingkai kebijakan kontroversial.

B. Framing pemberitaan Kompas.com

Kompas.com menerbitkan tiga berita dalam rentang 25 hingga 26 September 2025. Analisis terhadap ketiga berita dalam corpus Kompas.com menggunakan empat elemen framing Entman dapat diringkas dalam tabel berikut.

Tabel 2. Temuan Analisis Framing Kompas.com (Corpus : K1–K3)

Elemen Entmen	Temuan Per-Berita dalam Corpus	Pola Dominan Media
Define Problems	K1 [26], Masalah didefinisikan sebagai akumulasi ketidakharmonisan sejak Maret 2025, bukan insiden tunggal. Kata "meruncing" mengindikasikan eskalasi bertahap. K2 [27], Mutasi ASN tidak dianggap masalah utama, melainkan hanya puncak dari masalah yang lebih dalam, menurut pakar yang dikutip. Masalah sesungguhnya adalah fondasi politik lokal yang rapuh. K3 [28], Definisi masalah tampil paling luas, yaitu ancaman terhadap fungsi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik Sidoarjo.	Kegagalan struktural tata kelola pemerintahan daerah. Kompas.com menarik isu ini keluar dari sentimen pribadi dan mengarahkannya ke analisis kontekstual yang lebih luas. Definisi masalah berkembang secara progresif, dari akumulasi ketegangan di K1, ke koalisi rapuh di K2, hingga ancaman pelayanan publik di K3.
Diagnose Causes	K1 [26], Dua level penyebab, yaitu perilaku pengabaian Bupati sejak Maret 2025 dan	Penyebab masalah selalu dicari pada level sistem, yaitu koalisi Pilkada transaksional dan kelemahan regulasi UU Nomor 23 Tahun 2014.

	dinamika koalisi lintas partai yang hanya berorientasi elektoral. K2 [27], Dua faktor struktural ditonjolkan lewat pakar, yaitu koalisi Pilkada transaksional yang mudah retak dan posisi wakil bupati yang secara struktural lemah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. K3 [28], Penyebab bergeser ke regulasi, yaitu ketidakjelasan tupoksi wabup, khususnya fungsi wasdalbin, yang membuat posisinya secara hukum rentan diabaikan.	Kompas.com mengandalkan pendapat pakar akademik untuk menjelaskan penyebab ini, alih-alih mengandalkan pernyataan saling serang dari kedua pejabat yang berkonflik.
Make Moral Judgment	K1 [26], Penilaian relatif berimbang. Kompas juga memuat bantahan Mimik atas isu ketidakharmonisan pada Juni 2025. K2 [27], Penilaian moral diarahkan ke sistem lewat narasumber tunggal, yaitu pakar Ken Bimo Sultoni. K3 [28], Penilaian moral diarahkan sepenuhnya kepada dampak pada masyarakat, seperti tercermin dalam pernyataan bahwa masyarakat sangat dirugikan.	Sistem politik dan masyarakat diposisikan sebagai subjek utama, bukan individu tertentu. Tidak ada tokoh yang diposisikan sebagai pahlawan atau penjahat. Hal ini terlihat jelas karena Bupati Subandi sama sekali tidak mendapat kutipan langsung di seluruh tiga berita Kompas.com.
Treatment Recommendation	K1 [26], Rekomendasi tersirat, yaitu perlunya perbaikan pola komunikasi dan relasi kepemimpinan secara menyeluruh. K2 [27], Rekomendasi eksplisit dalam empat lapis, yaitu intervensi Kemendagri, keterlibatan parpol, reformasi kelembagaan posisi wabup, dan penegakan transparansi. K3 [28], Rekomendasi eksplisit dan praktis, yaitu parpol pengusung dan tokoh masyarakat diminta segera menjadi mediator untuk kompromi.	Solusi bersifat berlapis, mulai dari mediasi parpol pengusung sebagai langkah jangka pendek, pengawasan Kemendagri sebagai langkah jangka menengah, hingga reformasi perundang-undangan sebagai agenda jangka panjang. Kompas.com menjadi satu-satunya media yang menyarankan perubahan legislatif.

Sebaliknya, Kompas.com menunjukkan orientasi jurnalisme kontekstual yang secara radikal melakukan depersonalisasi konflik. Media ini secara sengaja menarik isu keluar dari sentimen pribadi dan membingkainya sebagai kegagalan struktural tata kelola daerah akibat lemahnya regulasi (UU No. 23 Tahun 2014) serta rapuhnya koalisi transaksional. Dengan mengandalkan analisis pakar akademik untuk memutus siklus perang opini elite serta secara total menghindari kutipan langsung dari pihak bupati, Kompas.com berhasil mengarahkan penilaian moral murni pada evaluasi sistemik yang merugikan publik. Rekomendasi yang ditawarkan pun menjadi yang paling komprehensif, mencakup mediasi politik hingga reformasi perundang-undangan. Pendekatan struktural ini mengonfirmasi temuan Muslyha dkk. (2025) bahwa Kompas.com mengutamakan penekanan pada tata nilai demokrasi ketimbang drama personal.

C. Framing pemberitaan Suara Surabaya

Suara Surabaya menerbitkan empat berita dalam rentang 18 hingga 22 September 2025, dengan komposisi yang mengonfirmasi adanya praktik dualitas genre kelembagaan. Analisis terhadap berita harian (*straight news*) dalam corpus Suara Surabaya berdasarkan elemen framing Entman dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Temuan Analisis Framing Suara Surabaya (Corpus : SS1, SS2, SS4)

Elemen Entmen	Temuan Per-Berita dalam Corpus	Pola Dominan Media
Define Problems	SS1 [29], Masalah diposisikan sebagai dugaan, tercermin dari kata "disinyalir". Berita ini menggabungkan isu cacat prosedur mutasi dan dugaan pelanggaran kewenangan staf pribadi Bupati.	Krisis tata kelola administratif yang disajikan secara bertahap, berhati-hati, dan objektif untuk menjaga kondusifitas lokal

	SS2 [30], Timeline berjudul "Lini Masa Keretakan" mendefinisikan masalah sebagai pola berulang yang terdokumentasi selama tujuh bulan. SS4 [31], Persoalan administratif konkret yang dapat diverifikasi, yaitu 61 ASN dimutasi padahal kesepakatan awal hanya 31 jabatan.	tanpa memicu kegaduhan prematur.
Diagnose Causes	SS1 [29], Penyajian berimbang. Surat Mimik tidak direspons TPK, namun proses BKN dinyatakan lengkap. SS2 [30], Penyebab digali pada pola pengambilan keputusan sepihak yang berulang sejak Maret. SS4 [31], Dua klaim disajikan berdampingan tanpa pemihakan. Suara Surabaya mencatat klaim 31 jabatan langsung dari Mimik.	Tindakan sepihak Bupati dan kebuntuan komunikasi birokrasi, di mana redaksi Suara Surabaya mampu bersikap objektif termasuk mencatat inkonsistensi klaim internal pihak Wabup sendiri pada SS4.
Make Moral Judgment	SS1 [29], Penilaian berimbang, namun urutan penyajian memberi kata akhir pada legitimasi Bupati lewat BKN. SS2 [30], Objektivitas mencatat inkonsistensi sikap Mimik sendiri, yang membantah adanya keretakan pada Juni namun mengakuinya pada September. SS4 [31], Paling mendekati prinsip <i>cover both sides</i> . Subandi mendapat sub-judul tersendiri yang setara kedudukannya dengan Mimik.	Penilaian moral yang sangat berimbang, normatif, dan tidak menghakimi, serta objektif dalam memotret kontradiksi dari kedua belah pihak yang berkonflik.
Treatment Recommendation	SS1 [29], Informatif murni, hanya memetakan posisi tanpa rekomendasi. SS2 [30], Rekomendasi tidak langsung, lewat kutipan partai pengusung lokal, yaitu Golkar Sidoarjo dan Gerindra Jatim. SS4 [31], Rekomendasi tersirat, yaitu pelaporan ke Kemendagri sebagai verifikasi netral.	Solusi yang bersifat normatif dan mengalir apa adanya, mengandalkan mediasi partai lokal atau penyerahan proses ke jalur formal pemerintahan.

Pada ranah berita harian (*straight news*), Suara Surabaya membingkai krisis administratif ini secara berhati-hati, bertahap, dan objektif guna menjaga kondusifitas lokal. Redaksi secara konsisten menyajikan klaim yang berimbang dari kedua belah pihak tanpa tendensi menghakimi. Menariknya, Suara Surabaya tampil kritis sebagai satu-satunya media yang secara teliti mencatat inkonsistensi klaim internal kubu Wakil Bupati terkait selisih jumlah jabatan yang dimutasi. Penilaian moral dan rekomendasi solusi yang dihadirkan di ruang berita harian ini dibiarkan normatif dan mengalir apa adanya, mengandalkan seruan mediasi partai politik lokal maupun penyerahan proses pada mekanisme formal pemerintahan.

D. Temuan Khusus : Konstruksi Realitas Melalui Tajuk *Editorial* (SS3)

Selain tiga berita harian di atas, Suara Surabaya juga menerbitkan tajuk opini redaksi (*editorial*) bertajuk "Nyala Matahari Kembar Sidoarjo Yang Membakar Rakyatnya" (SS3) [32]. Berita bergenre opini ini diposisikan secara khusus di luar korpus analisis *straight news* utama. Melalui ruang editorial ini, redaksi Suara Surabaya melepaskan jubah netralitas normatifnya dan secara agresif mendefinisikan masalah sebagai krisis kepemimpinan yang berdampak terukur pada pelayanan publik, dibuktikan dengan data konkret serapan anggaran daerah yang baru mencapai 41,24 persen. Pada elemen penyebab dan penilaian moral, editorial menghakimi ego kedua pemimpin dengan membandingkannya pada kasus serupa di daerah lain (Bojonegoro dan Tasikmalaya), serta secara tegas menempatkan rakyat sebagai korban dari perseteruan elite. Pemunculan editorial ini secara empiris membuktikan adanya praktik dualitas genre kelembagaan pada Suara Surabaya: bersikap hati-hati di berita harian, namun bertindak sebagai penjaga moral (*moral guardian*) yang tajam di ruang opini redaksi.

E. Perbandingan Framing Antarmedia

Dari hasil analisis per media yang telah dipaparkan, terlihat bahwa ketiga media mengonstruksi realitas yang berbeda atas peristiwa yang sama. Agar perbandingan pola pembingkai ini bersifat setara (*apple-to-apple*), analisis komparatif antar-media pada bagian ini difokuskan secara khusus pada berita-berita bergenre *straight news* (berita harian) dari masing-masing media. Adapun pemberitaan bergenre opini atau tajuk *editorial* (seperti temuan SS3 pada Suara Surabaya) dipisahkan dari perbandingan utama dan diposisikan sebagai temuan tambahan untuk membuktikan praktik dualitas genre kelembagaan pada media lokal.

Tabel 4. Perbandingan Pola Framing Dominan Ketiga Media

Elemen Entmen	Detik.com	Kompas.com	Suara Surabaya
---------------	-----------	------------	----------------

Define Problems	Konflik personal dua individu (Bupati vs Wabup) melalui jurnalisme episodik yang dikemas sebagai konten berseri.	Kegagalan struktural tata kelola pemerintahan daerah, ditarik keluar dari sentimen pribadi ke analisis kontekstual.	Krisis tata kelola administratif yang disajikan secara berhati-hati, bertahap, dan objektif untuk menjaga kondusifitas lokal.
Diagnose Causes	Tindakan sepihak Bupati Subandi, namun redaksi cenderung menerima klaim elite tanpa verifikasi angka yang konsisten.	Koalisi Pilkada yang rapuh dan kelemahan regulasi UU No. 23/2014, bersandar pada analisis pakar akademik.	Tindakan sepihak Bupati dan kebuntuan komunikasi, serta mampu mencatat inkonsistensi klaim internal kubu Wabup.
Make Moral Judgment	Imisit memihak Mimik akibat dominasi kutipan narasumber, namun tidak konsisten karena ketiadaan pakar.	Sistem politik dan masyarakat diposisikan sebagai subjek yang dinilai; Bupati Subandi sama sekali tidak dikutip langsung.	Penilaian moral yang sangat berimbang, normatif, dan objektif dalam memotret kontradiksi kedua belah pihak.
Treatment Recommendation	Bersifat reaktif dan formal, mengarahkan konflik ke intervensi tingkat lanjut ke Kemendagri.	Solusi berlapis mulai dari mediasi parpol, pengawasan Kemendagri, hingga reformasi perundang-undangan.	Solusi normatif dan mengalir apa adanya, mengandalkan mediasi partai lokal atau penyerahan ke jalur formal.

Sumber : Sintesis hasil analisis corpus berita dari Detik.com, Kompas.com, dan Suara Surabaya (Straight news), 17–26 September 2025.

Bila merujuk pada Tabel 4, tampak jelas ada jurang pemisah yang lebar terkait cara pandang ketiga media tersebut. Detik.com beroperasi melalui pendekatan episodik-dramatik yang mempraktikkan komodifikasi konflik, sehingga memposisikan isu murni sebagai drama personal. Sebaliknya, Kompas.com berpijak pada pendekatan analitis-struktural berbalut jurnalisme kontekstual, menarik konflik ini ke ranah kegagalan sistemik tata kelola dan regulasi. Sementara itu, Suara Surabaya menunjukkan kepekaan komunitas lokal melalui praktik dualitas genre kelembagaan: memetakan peta konflik secara netral di berita harian (straight news), namun memaksimalkan tajuk editorial untuk mengetuk moralitas pemimpin atas kerugian nyata warga. Perbedaan konstruksi yang didorong oleh orientasi redaksional dan strategi narasumber ini berpotensi kuat mempolarisasi persepsi audiens Sidoarjo dalam memaknai krisis kepemimpinan di daerahnya.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, ditarik benang merah bahwa tiap-tiap media punya gaya tersendiri dalam merakit realitas terkait polemik pemindahan tugas ASN di Sidoarjo akibat determinasi orientasi editorial, kedekatan kontekstual, dan strategi pemilihan narasumber. Detik.com membingkai peristiwa ini sebagai perseteruan personal antar elite melalui jurnalisme episodik yang mereduksi substansi tata kelola birokrasi menjadi komodifikasi drama politik. Sebaliknya, Kompas.com menerapkan jurnalisme kontekstual dengan mendepersonalisasi konflik menjadi isu kegagalan struktural tata kelola daerah dan regulasi. Sementara itu, Suara Surabaya mempraktikkan dualitas genre kelembagaan dengan menjaga netralitas secara berimbang di berita harian (straight news) namun bertindak sebagai penjaga moral (moral guardian) yang menyoroti ancaman kerugian pelayanan publik di ruang opini (editorial).

Secara teoretis, temuan ini memperkaya model framing Entman dengan membuktikan bahwa media lokal memiliki keleluasaan memberikan penilaian moral yang lebih eksplisit pada konflik politik tingkat mikro dibandingkan media nasional. Secara praktis, riset ini diharapkan menjadi otokritik bagi media untuk menghindari polarisasi narasi elite sekaligus menjadi referensi kritis bagi masyarakat. Mengingat penelitian ini terbatas pada 13 korpus berita di fase awal eskalasi (September 2025), penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas rentang waktu pengamatan atau mengomparasikan teks jurnalistik dengan diskursus di media sosial guna memetakan sirkulasi narasi resolusi konflik secara komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji-syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya jurnal penelitian ini. Penulis menyadari bahwa karya ini terwujud berkat bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua dan Keluarga Besar atas segala pengorbanan, cinta, serta doa yang tak pernah putus. Terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Masayu Musdalifa, S.Pd., selaku rekan diskusi yang telah memberikan waktu, kesabaran, dan masukan kritis selama proses penyusunan penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat yang berarti.

REFERENSI

- [1] eben haezar, "Hasil Real Count Pilkada Sidoarjo 2024, Subandi-Mimik Menang 58 Persen," *tribunnews.com*. [Online]. Available: <https://mataraman.tribunnews.com/2024/11/28/hasil-real-count-pilkada-sidoarjo-2024-subandi-mimik-menang-58-persen>
- [2] detikjatim, "Subandi-Mimik Idayana Tetap Maju Pilbup Sidoarjo Meski Tak Diusung PKB," *detik.com*. [Online]. Available: <https://www.detik.com/jatim/pilkada/d-7515253/subandi-mimik-idayana-tetap-maju-pilbup-sidoarjo-meski-tak-diusung-pkb>
- [3] hery susetyo, "Subandi-Mimik Idayana Resmi Ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Terpilih," *mediaindonesia.com*. [Online]. Available: <https://mediaindonesia.com/pilkada/733076/subandi-mimik-idayana-resmi-ditetapkan-sebagai-bupati-dan-wakil-bupati-sidoarjo-terpilih>
- [4] runik sri astuti, "Subandi-Mimik Idayana Tumbangkan Dominasi 20 Tahun PKB di Sidoarjo," *kompas.id*. [Online]. Available: <https://www.kompas.id/artikel/subandi-mimik-idayana-tumbangkan-dominasi-pkb-di-pilkada-sidoarjo-selama-20-tahun>
- [5] *kompas.com*, "Konflik Bupati dan Wabup Sidoarjo Meruncing, Mimik Berencana Laporkan Subandi ke Kemendagri," *surabaya.kompas.com*. [Online]. Available: <https://surabaya.kompas.com/read/2025/09/25/065231978/konflik-bupati-dan-wabup-sidoarjo-meruncing-mimik-berencana-laporkan#>
- [6] Suparno, "Konflik Bupati Vs Wabup Sidoarjo Memanas Lagi Imbas Mutasi 60 ASN," *detik.com*. [Online]. Available: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8117023/konflik-bupati-vs-wabup-sidoarjo-memanas-lagi-imbasmutasi-60-asn>
- [7] *suarasurabaya.net*, "Mimik Akan Laporkan Prosedur Mutasi ASN ke Kemendagri, Subandi: Sudah Sesuai Aturan," *suarasurabaya.net*. [Online]. Available: <https://www.suarasurabaya.net/politik/2025/mimik-akan-laporkan-prosedur-mutasi-asn-ke-kemendagri-subandi-sudah-sesuai-aturan/>
- [8] *detiknews*, "Wabup Mimik Resmi Laporkan Bupati Sidoarjo ke Kemendagri soal Mutasi 61 ASN," *detik.com*. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita/d-8129339/wabup-mimik-resmi-laporkan-bupati-sidoarjo-ke-kemendagri-soal-mutasi-61-asn>
- [9] *surabaya.bisnis.com*, "Duduk Perkara Selisih Paham Bupati dan Wabup Sidoarjo karena Mutasi ASN," *bisnis.com*. [Online]. Available: <https://surabaya.bisnis.com/read/20250923/531/1913730/duduk-perkara-selisih-paham-bupati-dan-wabup-sidoarjo-karena-mutasi-asn>
- [10] *surabaya.kompas.com*, "Bupati-Wabup Sidoarjo Berkonflik, Pakar: Koalisi Hanya Berorientasi Kemenangan Mudah Retak," *kompas.com*. [Online]. Available: <https://surabaya.kompas.com/read/2025/09/25/163130078/bupati-wabup-sidoarjo-berkonflik-pakar-koalisi-hanya-berorientasi>
- [11] amir baihaqi, "Makin Meruncing Konflik Bupati dan Wabup Sidoarjo gegara Mutasi ASN," *detik.com*. [Online]. Available: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8117654/makin-meruncing-konflik-bupati-dan-wabup-sidoarjo-gegara-mutasi-asn>
- [12] Similarweb, "Top News & Media Publishers Websites Ranking in Indonesia," *similarweb*. [Online]. Available: <https://www.similarweb.com/top-websites/indonesia/news-and-media/>
- [13] roymorgan, "detikcom, KOMPAS.com & LIPUTAN6 are Indonesia's leading news websites," *roymorgan.com*. [Online]. Available: <https://www.roymorgan.com/findings/detikcom-kompas-com-liputan6-are-indonesias-leading-news-websites>
- [14] *suarasurabaya.net*, "Tentang Kami," *suarasurabaya.net*. [Online]. Available: <https://www.suarasurabaya.net/about/>
- [15] R. M. Entman, "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm," *J. Commun.*, vol. 43, no. 4, pp. 51–58, 1993, doi: 10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x.
- [16] Eriyanto, "Analisis-framing-konstruksi-ideologi-dan-politik-media," 2012.
- [17] A. N. Rahmanto, A. M. I. Naini, A. Priliantini, C. T. Hendriyani, and M. Anshori, "Krisis dan Komunikasi Kepemimpinan Publik: Analisis Framing Media Sosial Kepala Daerah di Indonesia pada Masa Pandemi

- COVID-19,” vol. 11, no. 2, pp. 178–190, 2022.
- [18] Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 2017.
- [19] M. . Prof. Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif [Edisi Revisi],” 2017.
- [20] Rachmat Kriyantono, “Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif. Kencana.,” 2021.
- [21] Suparno, “Bupati Sidoarjo Mutasi 60 ASN, Wakil Bupati Tak Terima!,” detik.com. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita/d-8117107/bupati-sidoarjo-mutasi-60-asn-wakil-bupati-tak-terima>
- [22] Suparno, “Mutasi Pejabat Sidoarjo Pemicu Konflik Subandi-Mimik Sudah Sesuai Aturan,” detik.com. [Online]. Available: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8117871/mutasi-pejabat-sidoarjo-pemicu-konflik-subandi-mimik-sudah-sesuai-aturan>
- [23] Auliyau rohman, “6 Fakta Baru Panasnya Konflik Bupati Subandi Vs Mimik Buntut Mutasi ASN,” detik.com. [Online]. Available: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8123834/6-fakta-baru-panasnya-konflik-bupati-subandi-vs-mimik-buntut-mutasi-asn>
- [24] Suparno, “Wabup Sidoarjo Bakal Laporkan Bupati ke Kemendagri Buntut Mutasi 60 ASN,” detik.com. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita/d-8123941/wabup-sidoarjo-bakal-laporkan-bupati-ke-kemendagri-buntut-mutasi-60-asn/amp>
- [25] Auliyau rohman, “Wabup Mimik Resmi Laporkan Bupati Sidoarjo ke Kemendagri soal Mutasi 61 ASN,” detik.com. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita/d-8129339/wabup-mimik-resmi-laporkan-bupati-sidoarjo-ke-kemendagri-soal-mutasi-61-asn>
- [26] I. Najibah and A. Hartik, “Konflik Bupati dan Wabup Sidoarjo Meruncing, Mimik Berencana Laporkan Subandi ke Kemendagri,” *kompas.com*. [Online]. Available: <https://surabaya.kompas.com/read/2025/09/25/065231978/konflik-bupati-dan-wabup-sidoarjo-meruncing-mimik-berencana-laporkan>
- [27] I. Najibah and A. gonsaga, “Bupati-Wabup Sidoarjo Berkonflik, Pakar: Koalisi Hanya Berorientasi Kemenangan Mudah Retak,” *kompas.com*. [Online]. Available: <https://surabaya.kompas.com/read/2025/09/25/163130078/bupati-wabup-sidoarjo-berkonflik-pakar-koalisi-hanya-berorientasi>
- [28] I. Najibah and icha Rastika, “Tengahi Konflik Subandi-Mimik Sidoarjo, Parpol Pengusung Dinilai Perlu Turun Tangan,” *kompas.com*. [Online]. Available: <https://surabaya.kompas.com/read/2025/09/26/203557378/tengahi-konflik-subandi-mimik-sidoarjo-parpol-pengusung-dinilai-perlu-turun>
- [29] Billy Patoppoi, “Hubungan Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo Disinyalir Memanas Pasca-Mutasi 60 ASN,” *suarasurabaya.net*. [Online]. Available: <https://www.suarasurabaya.net/politik/2025/hubungan-bupati-wakil-bupati-sidoarjo-disinyalir-memanas-pasca-mutasi-60-asn/>
- [30] Billy Patoppoi, “Lini Masa Keretakan Hubungan Subandi Mimik,” *suarasurabaya.net*. [Online]. Available: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/lini-masa-keretakan-hubungan-subandi-mimik/>
- [31] Billy Patoppoi, “Mimik Akan Laporkan Prosedur Mutasi ASN ke Kemendagri, Subandi: Sudah Sesuai Aturan,” *suarasurabaya.net*. [Online]. Available: <https://www.suarasurabaya.net/politik/2025/mimik-akan-laporkan-prosedur-mutasi-asn-ke-kemendagri-subandi-sudah-sesuai-aturan/>
- [32] E. prastyo, “Nyala Matahari Kembar Sidoarjo Yang Membakar Rakyatnya,” *suarasurabaya.net*. [Online]. Available: <https://www.suarasurabaya.net/catatan-pemred/2025/nyala-matahari-kembar-sidoarjo-yang-membakar-rakyatnya/>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.